

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kecamatan Amuntai Tengah

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Amuntai Tengah merupakan dataran rendah yang terletak di 2° 24' 57,1" Lintang Selatan dan 115° 14' 56,3" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah berupa daratan seluas 77,09 km². Sampai dengan akhir tahun 2022, wilayah administrasi Kecamatan Amuntai Tengah terdiri dari 29 desa/kelurahan (24 desa dan 5 kelurahan). Kecamatan Amuntai Tengah merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Amuntai Tengah memiliki batas-batas:

- 1) Utara = Kecamatan Amuntai Utara
- 2) Barat = Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Sungai Pandan
- 3) Selatan = Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 4) Timur = Kabupaten Banjar

Tabel 4. 1
Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Desa Danau Cermin	9,10	11,81
2	Desa Pinangkara	7,01	9,10
3	Desa Pinang Habang	10,30	13,35
4	Desa Tapus	6,39	8,29
5	Desa Mawar Sari	19,75	25,62
6	Desa Datu Kuning	2,01	2,61
7	Desa Muara Tapus	1,49	1,93
8	Desa Rantawan	2,86	3,71
9	Desa Kandang Halang	1,27	1,65
10	Desa Pasar Senin	2,89	3,75
11	Desa Kembang Kuning	0,85	1,10
12	Desa Kota Raden Hilir	1,24	1,61
13	Desa Kota Raden Hulu	0,54	0,71
14	Kelurahan Kebun Sari	1,14	1,47
15	Desa Sungai Karias	1,38	1,79
16	Desa Hulu Pasar	0,08	0,11
17	Desa Tambalangan	0,09	0,11
18	Desa Tangga Ulin Hulu	0,19	0,25
19	Desa Tangga Ulin Hilir	0,15	0,20
20	Kelurahan Antasari	0,88	1,14
21	Kelurahan Murung Sari	0,36	0,46
22	Kelurahan Paliwara	0,27	0,35
23	Desa Palampitan Hulu	0,28	0,37
24	Desa Palampitan Hilir	0,39	0,51
25	Kelurahan Sungai Malang	3,43	4,45
26	Desa Tigarun	0,71	0,92
27	Desa Sungai Baring	0,08	0,11

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
28	Desa Harus	1,58	2,05
29	Desa Harusan	0,36	0,47
Total		77,09	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025b

Penduduk di Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2024 sebanyak 52.089 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.987 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 26.102 jiwa merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2024 mencapai 676 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Desa Tambalangan sebesar 17.000 jiwa/km² dan terendah di Desa Mawar Sari, sebesar 35 jiwa/km².

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Danau Cermin	623	561	1.184
2	Desa Pinangkara	330	318	648
3	Desa Pinang Habang	338	354	737
4	Desa Tapus	840	831	1.671
5	Desa Mawar Sari	342	350	692
6	Desa Datu Kuning	726	726	1.452
7	Desa Muara Tapus	894	909	1.803

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
8	Desa Rantawan	1.333	1.329	2.662
9	Desa Kandang Halang	1.258	1.187	2.445
10	Desa Pasar Senin	1.214	1.178	2.392
11	Desa Kembang Kuning	638	659	1.297
12	Desa Kota Raden Hilir	759	789	1.548
13	Desa Kota Raden Hulu	649	681	1.330
14	Kelurahan Kebun Sari	2.047	2.161	4.208
15	Desa Sungai Karias	1.128	1.053	2.181
16	Desa Hulu Pasar	520	485	1.005
17	Desa Tambalangan	773	757	1.530
18	Desa Tangga Ulin Hulu	407	410	817
19	Desa Tangga Ulin Hilir	686	682	1.368
20	Kelurahan Antasari	1.964	1.956	3.920
21	Kelurahan Murung Sari	657	741	1.398
22	Kelurahan Paliwara	983	1.071	2.054
23	Desa Palampitan Hulu	1.078	1.043	2.121
24	Desa Palampitan Hilir	1.312	1.276	2.588
25	Kelurahan Sungai Malang	3.254	3.324	6.578
26	Desa Tigarun	346	352	698

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
27	Desa Sungai Baring	242	251	493
28	Desa Harus	318	369	687
29	Desa Harusan	283	299	582
Amuntai Tengah		25.987	26.102	52.089

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

2. Kondisi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah

Kecamatan Amuntai Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah yang didominasi oleh daerah rawa dan berada pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Negara beserta anak-anak sungainya. Kondisi topografi yang relatif datar menyebabkan aliran air berlangsung lambat sehingga meningkatkan potensi terjadinya genangan dan banjir, terutama pada musim hujan dengan curah hujan tinggi. Selain faktor hidrologis, keberadaan permukiman yang berkembang di sekitar bantaran sungai turut meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir. Dengan karakteristik tersebut, Kecamatan Amuntai Tengah termasuk wilayah yang secara periodik mengalami kejadian banjir dan menjadi salah satu fokus penanganan kebencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari aspek sosial dan ekonomi, sebagian besar masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah menggantungkan mata pencaharian pada

sektor perdagangan, jasa, pertanian, perikanan air tawar, serta usaha mikro dan kecil. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan aksesibilitas wilayah. Ketika banjir terjadi, berbagai aktivitas produktif mengalami gangguan karena akses transportasi terhambat, fasilitas umum tidak dapat berfungsi secara optimal, serta sebagian masyarakat harus memprioritaskan upaya penyelamatan harta benda dan kebutuhan dasar keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana banjir tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan data kejadian bencana yang tersedia, banjir di Kecamatan Amuntai Tengah menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sisi dampak material. Pada kejadian banjir tahun 2024 tercatat sebanyak 1.815 rumah terdampak genangan. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah rumah terdampak meningkat menjadi 1.912 unit atau bertambah sebanyak 97 rumah dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, data tahun 2025 menunjukkan tingkat dampak yang lebih rinci dengan tercatat sebanyak 341 rumah mengalami kondisi terendam penuh (full). Peningkatan jumlah rumah terdampak tersebut mengindikasikan bertambahnya cakupan wilayah genangan maupun meningkatnya intensitas dampak banjir terhadap kawasan permukiman. Di samping itu, banjir juga berdampak pada infrastruktur publik dengan panjang jalan terdampak mencapai 3.770 meter pada tahun 2025. Berdasarkan indikator kebencanaan, peningkatan jumlah objek terdampak tersebut dapat

dikategorikan sebagai peningkatan tingkat dampak bencana meskipun tidak terjadi peningkatan korban jiwa.

Tabel 4. 3
Data Banjir Di Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024

No.	Desa/ kelurahan	Rumah	Sekolah/ kantor	Tempat ibadah	Jalan	Keterangan
1	Antasari	140			6 jalur	Yang terdampak banjir jl. Abdul azis, jl. H. Ali, jl. Gusti saputra, jl. Bihman villa, jl. Abdul hamidan, sebagian jalan penghulu rasyid
2	Murung sari	32	1	1	3 jalur	
3	Kebun sari	-	-	-	-	Laporan sementara sampai jam 19.00 wita wil kebun sari terutama dibantaran sungai rt 01 sampai rt 6 ketinggian air masih dapat terkendali, air belum masuk ke jalan
4	Paliwara	172	-	1	18 jalur	Yang terdampak banjir rt 1, rt 2, rt 3, rt 4, rt 5, rt 6, rt 7, rt 8, rt 9
5	Sungai malang	97	12	-	8 jalur	Rumah terdampak banjir. Rt 1 (17 rumah). Rt 2 (19 rumah). Skolahan 5 buah. Kantor 7 buah. Tempat ibadah 1 buah rt 16 komp. Perumahan griya karya senin sebanyak 16 buah rumah dan ruas jalannya
6	Tapus	21	-	-	1 jalur	Yang terdampak banjir rt 1, rt 2, rt 3, rt 4, rt 5

No.	Desa/Kelurahan	Rumah	Sekolah/ kantor	Tempat ibadah	Jalan	Keterangan
7	Kandang halang	81	;-	;-	Jl. Provinsi	
8	Pasar senin	38	-	-	238 meter	
9	Kota raden hulu	26	-	-	1 jalur	Yg terdampak banjir rt.1, 2,3,4 rumah yg berada di bantaran sungai
10	Tangga ulin hilir	103	-	-	Rt 4 & rt 5	Rt 1 = 20 rumah, rt 2 = 13 rumah, rt 3 = 24 rumah, rt 4 = 36 rumah, rt 5 = 10 rumah
11	Tambalangan	550	1	4	Rt 1 - rt 5	Semua jalan dari rt 1 sampai rt 5 terendam air dan rata-rata banyak rumah terendam
12	Palampitan hulu	231	2	2	10 jalur	
13	Harus					
14	Pinangkara	50	-	-	Jalan titian ± 1000 meter	Yang terdampak banjir rt 1, rt 2, rt 3, rt 4 dan lahan pertanian tenggelam semua
15	Sungai karias	54	-	-		Yang terdampak banjir rt 1, rt 2, rt 3, rt 4, rt 5, & 1 buah fasilitas umum
16	Tigarun	55			2 jalur	Rt 01 = 20 rumah, rt 02 = 15 rumah, rt 03 = 20 rumah
17	Pinang habang	91	-	-	3 rt	Rt 01 = 26 rumah, rt 02 = 47 rumah, rt 03 = 18 rumah
18	Hulu pasar	250	-	1	11 jalur	
19	Kota raden hilir	13	-	-	1 jalur (±750 meter)	Rt.001 = 2 rumah, rt.002 = 3 rumah & rt.003 = 8 rumah

No.	Desa/Kelurahan	Rumah	Sekolah/ kantor	Tempat ibadah	Jalan	Keterangan
20	Rantawan	25	1	-	2 jalur	
21	Muara tapus	44	1	1	-	Rt 1 = 4 rumah, rt 2 = 9 rumah, rt 3 10 rumah, rt 4 = 12 rumah, 1 gedung taqhfidz, 1 gedung sekolah ra paud
22	Palampitan hilir	90	-	2	Jl. Negara & jl. Negara dipa	Yang terdampak banjir rt 1, rt 2, rt 3, rt 4, rt 5, rt 6
23	Harusan	54	-	-	-	Jalan desa rt 1 - rt 3 cuma becek tidak terendam air
25	Kembang kuning	13	1	-	4 jalur	
26	Datu kuning					
27	Tangga ulin hulu					
28	Mawar sari	;-	V	-	-	Desa mawar sari sampai sekarang terpantau masih aman dari banjir
29	Danau cermin	123			3 jalur	Rt 1 - rt 4
J u m l a h	2375	19	11	0		

Sumber : BPBD HSU, 2026

Tabel 4. 4
Data Banjir Amuntai Tengah Tahun 2025

<i>KECAMATAN</i>	<i>JUMLAH</i>					<i>KONDISI TERDAMPAK</i>			<i>TERDAMPAK BANJIR</i>
	<i>DESA</i>	<i>RT/KEL</i>	<i>RUMAH</i>	<i>KK</i>	<i>JIWA</i>	<i>TERAS</i>	<i>TERAS DAN DAPUR</i>	<i>FULL</i>	<i>JALAN</i>
AMUNTAI TENGAH	20	57	1912	1432	4248	35	8	341	3770

Sumber : BPBD HSU, 2026

Penyebab banjir di Kecamatan Amuntai Tengah bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor lingkungan. Faktor alam meliputi tingginya curah hujan, meluapnya debit sungai akibat akumulasi aliran dari wilayah hulu, serta karakteristik dataran rendah yang menyebabkan air sulit mengalir secara cepat menuju daerah pembuangan. Sementara itu, faktor lingkungan mencakup berkurangnya kapasitas saluran drainase, sedimentasi sungai, penyempitan alur air akibat aktivitas pembangunan, serta perubahan tata guna lahan yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Kombinasi berbagai faktor tersebut menyebabkan air meluap ke kawasan permukiman dan fasilitas umum sehingga memicu terjadinya genangan dengan durasi yang bervariasi.

Wilayah yang paling sering terdampak banjir umumnya berada pada kawasan permukiman yang berdekatan dengan sungai, daerah cekungan, serta wilayah dengan sistem drainase yang kurang optimal. Kerentanan wilayah tersebut dipengaruhi oleh elevasi lahan yang rendah dan kedekatannya dengan sumber luapan air. Pada saat debit sungai meningkat, air dengan cepat memasuki kawasan permukiman sehingga mengakibatkan genangan pada rumah warga, jalan lingkungan, fasilitas

pendidikan, tempat ibadah, serta sarana pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang berada pada zona rawan banjir memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang maupun pengurangan risiko bencana.

Dampak banjir terhadap masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah mencakup berbagai aspek kehidupan. Dari sisi fisik, banjir menyebabkan kerusakan rumah, terhambatnya akses transportasi, serta terganggunya fungsi infrastruktur publik. Dari sisi sosial, aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan kemasyarakatan sering mengalami gangguan selama periode banjir berlangsung. Dari sisi ekonomi, masyarakat mengalami penurunan produktivitas akibat terhambatnya kegiatan usaha, perdagangan, dan distribusi barang. Selain itu, banjir juga meningkatkan kebutuhan pengeluaran rumah tangga untuk perbaikan bangunan, pemenuhan kebutuhan darurat, dan perlindungan aset keluarga. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa tidak terdapat korban jiwa pada kejadian banjir tahun 2024 maupun tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana serta mekanisme evakuasi dan peringatan dini telah berjalan relatif baik.

Secara keseluruhan, kondisi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi akibat kombinasi faktor geografis, hidrologis, dan lingkungan. Data tahun 2024–2025 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah rumah terdampak yang menandakan bertambahnya dampak material bencana, meskipun tidak diikuti oleh peningkatan korban jiwa. Situasi tersebut

menjadi dasar penting bagi penelitian mengenai kebencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, maupun efektivitas kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Amuntai Tengah guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang lebih berkelanjutan.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara

a) Keadaan Geografis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara beralamat di jalan Pembalah Batung, Desa Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan 71471. Berdasarkan alamatnya, bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara berdekatan dengan :

- 1) Utara = Langgaar Syi'arul Muslimin
- 2) Barat = LZ Computer Amuntai
- 3) Selatan = Simpang empat Paliwara
- 4) Timur = Syndicate 23 Printing

b) Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara

1) Visi

Menjadi lembaga penanggulangan bencana yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana di Kabupaten Hulu

Sungai Utara.

2) Misi:

- a) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.
- b) Melakukan mitigasi bencana secara terencana dan berkelanjutan.
- c) Menyelenggarakan tanggap darurat secara cepat, tepat, dan efektif.
- d) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara optimal.
- e) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana.

c) Struktur Organisasi dan Data Kepegawaian Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara

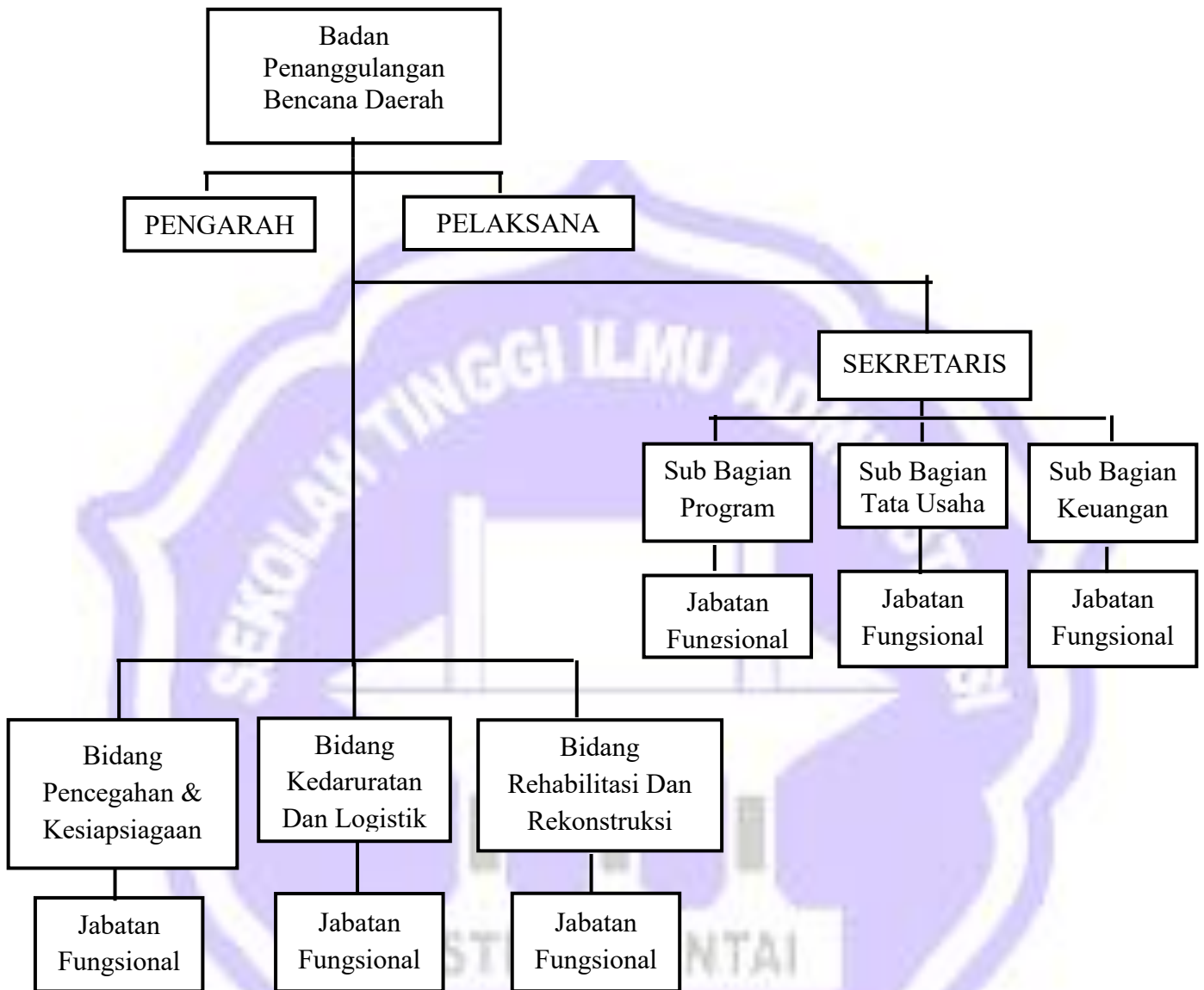
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Struktur organisasi tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Struktur organisasi yang ada di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari

kepala pelaksana yang dijabat oleh Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., sekretaris yang dijabat oleh Bapak Andry Rahmadillah, SKM., dan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian yakni sub bagian tata usaha yang dijabat oleh Ibu Norhilaliyah, S.Pi., sub bagian keuangan dan aset yang dijabat oleh Bapak Rahmat Noor Ridhani, S.Sos., MM., dan sub bagian program yang dijabat oleh Ibu Sri Herlinawati, SE., MM. Terdapat kepala bidang kedaruratan dan logistik yang dijabat oleh Bapak H. Sugianor, S.Pd., M.Pd., kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijabat oleh Ibu Ir. Lisa Arianti, ST., serta kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang dijabat oleh Bapak H. Parnami Azmi, SKM., MM. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga didukung oleh beberapa kepala sub bagian dan staf pelaksana, di antaranya pengolah data dan informasi yang dijabat oleh Nofiada Annisa, A.Md., pengadministrasi perkantoran seperti Udi Hartono, Rahmat Noor Ridhani, serta beberapa tenaga administrasi lainnya. Selain itu terdapat pula jabatan fungsional seperti penata penanggulangan bencana ahli pertama yang dijabat oleh Hasan Anshari, S.Sos., Nina Alvionita, S.Sos., dan Rizma Haliza, S.AP., serta perencana ahli pertama yang dijabat oleh Helmi, S.Sos. Struktur ini juga didukung oleh tenaga operasional seperti penata layanan operasional, operator layanan operasional, serta pengelola

umum operasional yang membantu kelancaran kegiatan di lingkungan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jumlah jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Sebagai Berikut.



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara



Tabel 4. 5
Data Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NAMA	NIP	JENIS KLM	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	H. Syamrani, S.Sos., M.AP	19680602 199002 1 002	LK	Pembina Utama Muda(IV/c)	Kepala Pelaksana
2	Andry Rahmaddilla h, SKM	19780524 200604 1 013	LK	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris BPBD
3	H. Sugianor, S.Pd., M.Pd	19750217 199703 1 004	LK	Pembina (IV/a)	Kabid Kedaruratan dan Logistik
4	Ir. Lisa Arianti, ST	19821003 201001 2 005	PR	Penata Tk. I (Pembina)	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5	H. Parnami Azmi, SKM, MM	19820904 200604 1 007	LK	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan
6	Norhilaliyah, S.Pi	19811206 200501 2 014	PR	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Tata Usaha
7	Rahmat Noor Ridhani, S.Sos, MM	19870120 200904 1 001	LK	Pembina (IV/a)	Kasubag Keuangan dan Aset
8	Sri Herlinawati, SE, MM	19760104 200604 2 016	PR	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Program
9	Udi Hartono	19761027 200701 1 009	LK	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran
10	Rini Jayanti, S.Kom	19920526 202505 2 001	PR	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
11	Rusmandani	19840101 201001 1 006	LK	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran

NO	NAMA	NIP	JENIS KLM	PANGKAT/	NO
12	Nofaida Annisa, A.Md	19950822 201903 2 018	PR	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi
13	Hasan Anshari, S.Sos	19900912 202421 1 021	LK	Golongan IX	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
14	Helmi, S.Sos	19860130 202421 1 005	LK	Golongan IX	Perencana Ahli Pertama
15	Nina Alvionita, S.Sos	19921115 202421 2 035	PR	Golongan IX	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
16	Rizma Haliza, S.AP	20000828 202421 2 007	PR	Golongan IX	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
17	Ahmad	19830313 202521 1 004	LK	Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran
18	Fakhriadi	19840106 202521 1 006	LK	Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran
19	M. Rawis Badali Rahman	20011009 202521 1 002	LK	Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran
20	Sapariati	19920707 202521 2 023	PR	Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran
21	Rizqa, S.AP	19990209 202521 2 070	PR	-	Penata Layanan Operasional
22	Muhammad Muchlis Amin	19890109 202521 1 106	LK	-	Operator Layanan Operasional
23	Rahmandani	19870501 202521 1 127	LK	-	Operator Layanan Operasional
24	Salabiah	19790925 202521 2 027	PR	-	Pengelola Umum Operasional

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha BPBD, 2026

**d) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara**

Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, BPBD merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pasal 4 disebutkan bahwa:

1) Tugas Pokok

- a) Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Uraian Tugas Pokok

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana alam secara adil dan merata.
- b) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana.
- d) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana.

- e) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana.
 - f) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana.
 - g) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - h) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 - i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - j) Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara sesuai bidang tugas.
- 3) Pengarah Penanggulangan Bencana
- a) Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
 - b) Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah.
 - c) Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.

- d) Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - e) Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - f) Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
 - g) Merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - h) Memantau dan mengevaluasi efentifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - i) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- 4) Pelaksana Penanggulangan Bencana
- a) Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
 - b) Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah.
 - c) Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.

- d) Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - e) Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - f) Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
 - g) Merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - h) Memantau dan mengevaluasi efentifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - i) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- 5) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana
- a) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana.
 - b) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana.
 - c) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana.

- d) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana.
- e) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
- f) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- g) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana.
- h) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
- i) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
- j) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
- k) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
- l) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
- m) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

6) Sekretariat

- a) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana.
- b) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran.
- d) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- e) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- f) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- g) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- h) Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud sekretariat BPBD ini dilengkapi dengan 3 (tiga) Subag yaitu: 1). Subag Program dan Data Subag program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 2). Subag Tata Usaha Subag Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan dan mengelola administrasi kepegawaian. 3). Subag Keuangan dan Aset Subag Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset.

7) Pencegahan dan Kesiagaan

- a) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;

- c) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
 - d) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - e) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
 - f) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
 - g) Menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h) Menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - i) Menyusun petunjuk teknis penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - j) Menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;
 - k) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana;
- dan

- 1) Melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- 8) Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - b) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - d) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - e) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - f) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan;

- g) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
- h) Menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan
- i) Menyusun pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana;
- j) Menyusun inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan, sumber daya alam maupun buatan;
- k) Menyusun petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana;
- l) Menyusun bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- m) Menyusun petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- n) Menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- o) Menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;
- p) Menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;

- q) Menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
 - r) Menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
 - s) Menyusun rumusan pelaksanaan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan, penyediaan sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian; dan
 - t) Melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- 9) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
 - b) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;

- d) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
- e) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;
- f) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- g) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
- h) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
- i) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- j) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan;
- k) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- l) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- m) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- n) Menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
- o) Menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
- p) Menyusun data inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan akibat bencana;
- q) Menyusun bahan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat, pelayanan kesehatan korban bencana, kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik, kerjasama pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan

ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, serta pemulihan fungsi pelayanan publik ;

- r) Menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
- s) Menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana serta kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana;
- t) Menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan baik fisik maupun non fisik;
- u) Menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ;
- v) Melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

- 10) Jabatan fungsional Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

B. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah

Didalam mendukung kinerja maka sudah saatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan perubahan terhadap pelayanan dan peningkatan tugas-tugas untuk mendukung kinerja.

Oleh karena itu reformasi pembaharuan terhadap pimpinan dan pegawai harus memiliki legimitasi yang sesuai dengan standarisasi dan perundang-undangan yang berlaku didalam mendukung akuntabilitas dan stabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan good governance.

Dan tak bisa dipungkiri bahwa pelayanan prima terhadap pimpinan masih jauh dari harapan legislatif karena lambatnya dan keterbatasan Manajemen Sumber Daya Manusia didalam menangkap dan membaca situasi yang berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara itu sendiri.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang

serius. Kesan-kesan yang buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja merosot.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. Banyak batasan yang dibatasi para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusnya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Istilah kinerja berasal dari kata *job perfomance* atau *actual perfomance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2017).

Maka untuk mengukur tingkat keberhasilan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menggunakan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) yang mengatakan bahwa proses Kinerja organisasi terdiri dari 5 (lima) komponen, yakni:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a) Produktivitas

a) Jumlah layanan yang dihasilkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Layanan dalam mitigasi banjir yang sudah dilakukan ada beberapa kegiatan berupa mengkaji beberapa wilayah rawan terjadinya banjir 5 tahun sekali dan dibuat ke dokumen kajian risiko, setelah itu melakukan sosialisasi ke desa, sekolah, atau ke perguruan tinggi. Selain itu juga ada namanya himbauan melalui sosial media, vidiotron, bisa juga dicetak melalui baliho dan ditelakkan di wilayah rawan. pembagian leaflet. Dan ada juga melakukan Destana (desa tangguh bencana), serta melakukan pelatihan relawan. Ketika bencana sudah terjadi kami biasanya menyiapkan bantuan sementara seperti sembako” (Wawancara pada 6 mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk kegiatan mitigasi banjir yang sudah kami lakukan, pertama kami melakukan pengkajian wilayah rawan banjir. Biasanya itu dilakukan setiap lima tahun sekali, lalu hasilnya kami susun dalam dokumen kajian risiko bencana sebagai dasar perencanaan. kami juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kegiatannya kami laksanakan di desa, sekolah, sampai ke perguruan tinggi. Tujuannya supaya masyarakat lebih paham terkait risiko banjir dan cara menghadapinya. Selain sosialisasi langsung, kami juga menyampaikan himbauan melalui berbagai media. Misalnya lewat media sosial, videotron, dan baliho yang dipasang di wilayah rawan banjir. Kami juga membagikan leaflet agar informasi bisa lebih mudah diterima masyarakat. Kemudian,

kami juga menjalankan program Desa Tangguh Bencana atau Destana, di mana masyarakat dilibatkan langsung dalam kegiatan mitigasi. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan untuk relawan agar mereka lebih siap ketika terjadi bencana.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Di lapangan, kami menjalankan kegiatan mitigasi sesuai arahan dari kantor. Biasanya kami ikut dalam kegiatan sosialisasi ke desa-desa, sekolah, dan kadang juga ke perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman terkait risiko banjir. Kami juga terlibat dalam penyebaran informasi seperti pembagian leaflet langsung ke masyarakat. Untuk himbauan, memang ada juga yang melalui media sosial atau baliho, tapi kalau kami di lapangan lebih ke penyampaian langsung ke warga. Kami juga ikut dalam kegiatan Destana, jadi turun ke desa untuk membantu pembentukan dan pendampingan desa tangguh bencana. Selain itu, kami juga dilibatkan dalam pelatihan relawan, baik sebagai pendamping maupun membantu pelaksanaan di lapangan. Kalau kondisi sudah terjadi bencana, biasanya kami langsung turun untuk membantu penyaluran bantuan sementara seperti sembako kepada masyarakat terdampak. Jadi memang lebih banyak kegiatan kami itu langsung berhubungan dengan masyarakat di lapangan.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Selain kegiatan sosialisasi, kami juga sering dilibatkan dalam pelatihan relawan kebencanaan. Biasanya kami membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan, mendampingi peserta pelatihan, dan ikut memberikan arahan sesuai kondisi yang sering kami temui saat penanganan bencana. Jadi relawan juga diberikan pemahaman bagaimana cara membantu masyarakat ketika banjir terjadi.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Semisal kondisi sudah terjadi banjir, biasanya kami langsung turun ke lapangan untuk membantu masyarakat terdampak. Kami membantu penyaluran bantuan sementara seperti sembako dan kebutuhan darurat lainnya. Memang sebagian besar kegiatan kami langsung berhubungan dengan masyarakat di lapangan.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini BPBD cukup aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi banjir. Kami sering menerima informasi terkait sosialisasi kebencanaan, pelatihan relawan, serta penyampaian himbauan kepada masyarakat. Saat terjadi banjir, BPBD juga melakukan pendataan dan penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak. Dari pihak kecamatan biasanya kami ikut berkoordinasi untuk mendukung kegiatan tersebut.” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Yang saya tahu BPBD sering datang ke desa untuk memberikan sosialisasi tentang banjir dan apa yang harus dilakukan kalau air mulai naik. Selain itu waktu banjir mereka juga ada memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Menurut saya kegiatan seperti itu cukup membantu masyarakat karena jadi lebih paham dan lebih siap menghadapi banjir.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau yang saya lihat, BPBD biasanya memberikan himbauan terkait banjir dan kadang ada petugas yang datang saat kegiatan di lingkungan masyarakat. Waktu banjir juga ada bantuan yang disalurkan untuk warga terdampak, itu saja yang saya dapatkan. Saya tidak tahu kegiatan mitigasi apa saja yang dilakukan bpbd kepada masyarakat.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk semua layanan BPBD saya kurang tahu secara lengkap. Yang saya ketahui biasanya mereka turun saat banjir terjadi dan ada pembagian bantuan untuk masyarakat terdampak. Saya juga pernah melihat informasi dari BPBD di media sosial, tetapi untuk program atau kegiatan lainnya saya belum terlalu mengetahui.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, diketahui bahwa BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam indikator jumlah layanan yang dihasilkan dapat dikategorikan cukup baik, karena layanan yang diberikan cukup beragam dan telah terlaksana, meskipun penyebaran informasi mengenai seluruh program masih perlu ditingkatkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti pengkajian wilayah rawan banjir, penyusunan dokumen kajian risiko bencana, sosialisasi kebencanaan, penyampaian himbauan melalui media sosial, videotron, baliho dan leaflet, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), pelatihan relawan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara aktif dan memberikan

manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan menghadapi banjir. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui seluruh program mitigasi yang dijalankan BPBD.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, capaian jumlah layanan yang dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam program mitigasi prabencana dinilai kurang baik. Penilaian ini didasarkan pada aktivitas mitigasi yang tampak dan dapat diidentifikasi secara langsung oleh peneliti selama proses observasi masih sangat terbatas, di mana peneliti sejauh ini baru mengetahui adanya kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat. Dan kondisi ini dipertegas dengan tidak adanya data yang didapat oleh peneliti untuk mengetahui secara komprehensif apa saja jenis, rincian, maupun sebaran kegiatan layanan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh BPBD.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator jumlah layanan yang dihasilkan dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori kurang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menilai layanan mitigasi yang diberikan BPBD sudah cukup baik melalui kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi kebencanaan, pelatihan relawan, pemantauan wilayah rawan banjir, dan koordinasi

dengan instansi terkait. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak sepenuhnya mengetahui layanan mitigasi yang diberikan oleh BPBD sehingga menunjukkan bahwa layanan yang ada belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh masyarakat. Meskipun berbagai kegiatan mitigasi telah dilaksanakan, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang valid, lengkap, dan terukur mengenai jumlah layanan mitigasi yang telah dihasilkan oleh BPBD. Peneliti tidak menemukan data pendukung yang dapat digunakan untuk membuktikan secara pasti jumlah layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Padahal, keberadaan data yang valid sangat penting untuk mengukur capaian layanan, menilai kinerja organisasi, serta menjadi dasar dalam evaluasi program mitigasi bencana banjir.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel Produktivitas karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator jumlah layanan yang dihasilkan dikategorikan kurang baik.

b) Pencapaian target program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk pencapaian target program mitigasi banjir, kami dari BPBD sudah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Setiap tahun kami melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang rawan banjir, khususnya di

Kecamatan Amuntai Tengah, agar kami bisa mengetahui tingkat risiko dan menentukan langkah penanganannya. Selain itu, program mitigasi juga kami jalankan secara rutin setiap tahun, jadi tidak hanya sekali saja. Kami juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan kondisi di lapangan, serta upaya-upaya pencegahan lainnya. Dari sisi target, kegiatan yang direncanakan pada umumnya sudah terlaksana. Kami juga terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan. Memang, untuk hasilnya masih perlu ditingkatkan lagi, terutama agar dampak banjir bisa lebih berkurang ke depannya.” (Wawancara pada 6 mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk pencapaian target program mitigasi banjir, secara umum kegiatan yang kami rencanakan itu sudah terlaksana. Target kami selalu melampaui target yang ingin dicapai tiap tahunnya. Setiap tahun kami memang ada kegiatan untuk mengkaji wilayah-wilayah yang rawan banjir, khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Dari situ kami bisa menentukan langkah-langkah penanganan yang lebih tepat. Kami juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pemantauan kondisi di lapangan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi dari sisi target kegiatan, sebagian besar sudah tercapai sesuai dengan perencanaan. Cuma untuk hasilnya di lapangan belum sepenuhnya maksimal. Masih ada kendala seperti keterbatasan sumber daya dan juga kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Jadi ke depan kami tetap berupaya agar program ini bisa lebih efektif dalam mengurangi dampak banjir.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau kami di lapangan biasanya menjalankan kegiatan sesuai arahan, seperti ikut sosialisasi ke masyarakat dan pengecekan daerah rawan banjir. Untuk kegiatan yang sudah ditargetkan, sebagian besar memang sudah terlaksana. Sosialisasi juga sudah beberapa kali dilakukan, terutama di daerah yang sering terdampak. Tapi memang masih ada masyarakat yang belum terlalu

memahami atau belum terlalu peduli dengan mitigasi banjir.”
(Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Dari yang saya lihat, kegiatan mitigasi sudah berjalan, seperti sosialisasi dan pemantauan. Kami juga sering dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Untuk pencapaian target sendiri, kegiatan yang direncanakan memang sudah dilaksanakan. Tapi untuk hasilnya, masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal partisipasi masyarakat supaya lebih aktif dalam upaya pencegahan banjir.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan mitigasi itu rutin dilakukan, terutama saat musim hujan mulai datang. Kami biasanya turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi dan memastikan daerah-daerah rawan tetap terpantau. Kalau untuk target, kegiatan yang diberikan dari kantor umumnya bisa dilaksanakan. Tapi memang ada kendala di lapangan, seperti keterbatasan personel dan fasilitas, jadi kadang pelaksanaannya belum maksimal.”(Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan, BPBD cukup aktif menjalankan program mitigasi banjir. Hampir setiap tahun ada sosialisasi, koordinasi dengan desa, serta pemantauan daerah rawan banjir. Dari pihak kecamatan juga sering menerima informasi dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut saya target program yang direncanakan umumnya dapat terlaksana karena

kegiatan yang sudah dijadwalkan biasanya tetap dijalankan sesuai rencana.” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Soal target program saya kurang mengetahui apakah sudah tercapai atau belum. Yang saya tahu memang pernah ada sosialisasi dari BPBD dan beberapa kegiatan terkait banjir di desa. Untuk penilaian targetnya saya tidak begitu paham karena itu mungkin lebih diketahui oleh pihak BPBD atau pemerintah desa.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya kurang tahu mengenai target program yang dimiliki BPBD. Apakah targetnya sudah tercapai atau belum saya tidak bisa menilai karena tidak mengetahui program yang direncanakan secara keseluruhan.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau ditanya tentang pencapaian target program, saya tidak terlalu mengetahui. Saya hanya mengetahui beberapa kegiatan yang pernah dilakukan BPBD, seperti pemberian informasi dan bantuan saat banjir. Untuk apakah target yang ditetapkan sudah tercapai atau belum, saya tidak mempunyai informasi mengenai hal tersebut.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, dan masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa indikator pencapaian target program dapat dikategorikan cukup baik, karena sebagian

besar kegiatan yang direncanakan telah terlaksana sesuai target, meskipun efektivitas hasil program masih memerlukan peningkatan, sebagian besar program mitigasi banjir yang telah direncanakan oleh BPBD dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan seperti pengkajian wilayah rawan banjir, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan lapangan, koordinasi dengan pihak terkait, serta upaya pencegahan lainnya dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Bahkan menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, capaian kegiatan yang dilaksanakan sering kali melampaui target yang telah ditentukan. Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa hasil program di lapangan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, fasilitas, personel, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap mitigasi banjir. Selain itu, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara rinci target program yang telah ditetapkan BPBD sehingga sulit memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaiannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, indikator pencapaian target program dapat dikategorikan kurang baik. Meskipun berbagai kegiatan mitigasi banjir telah dilaksanakan sesuai program yang direncanakan, peneliti tidak menemukan data yang valid, lengkap, dan terukur mengenai tingkat pencapaian target program yang telah ditetapkan. Ketiadaan data tersebut menyebabkan peneliti tidak

dapat memastikan sejauh mana target program mitigasi banjir telah tercapai secara optimal. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan personel dan sarana pendukung yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan program. Oleh karena itu, indikator pencapaian target program dinilai kurang baik karena belum didukung oleh data yang valid sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan program mitigasi banjir yang telah dilaksanakan. dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa keterbatasan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program, seperti keterbatasan personel dan sarana pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian target program dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori kurang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan dari pihak BPBD dan pihak kecamatan menilai bahwa program mitigasi banjir telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan seperti sosialisasi kebencanaan, pemantauan daerah rawan banjir, pelatihan relawan, dan koordinasi dengan instansi terkait terus dilaksanakan sebagai upaya mencapai target program yang telah direncanakan. Namun, beberapa masyarakat menyatakan tidak mengetahui bagaimana pencapaian target program mitigasi banjir yang telah dilaksanakan oleh BPBD

sehingga masyarakat tidak dapat menilai sejauh mana keberhasilan program tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun berbagai program mitigasi telah dilaksanakan, peneliti tidak menemukan data yang valid, lengkap, dan terukur mengenai tingkat pencapaian target program yang telah ditetapkan oleh BPBD. Ketiadaan data tersebut menyebabkan pencapaian target program tidak dapat dibuktikan secara jelas dan objektif. Padahal, data yang valid sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan program, mengetahui capaian yang telah diperoleh, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program mitigasi bencana banjir. Meskipun sebagian besar informan menilai pencapaian target program sudah cukup baik, indikator pencapaian target program tetap dinilai kurang baik karena belum didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana pencapaian target program yang telah dilaksanakan oleh BPBD.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel Produktivitas karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator pencapaian target program dikategorikan kurang baik.

b) Kualitas Layanan

a) Kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“ketika sosialisasi masyarakat tentang banjir respon masyarakat biasa saja karena banjir dianggap hal rutin tiap tahun terjadi. Cuma ketika sosialisasi terkait kebakaran masyarakat respon nya luar biasa, karena ancaman besar jadi masyarakat lebih tertarik ke arah kebakaran. Masyarakat juga sangat tertarik ketika diajak melakukan pelatihan. Ketika kami melakukan pembagian sembako masyarakat juga sangat menerima, namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak dapat sembako banyak yang menghubungi kami. Untuk yang bersifat anarkis tidak ada dikarenakan kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya jadi masyarakat sudah dijelaskan anggaran kami juga terbatas.” (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“ketika melakukan sosialisasi masyarakat senang karena mendapatkan informasi, dan juga konsumsi. Serta ketika ditunjuk untuk melakukan pelatihan masyarakat juga tertarik, siap dan bisa menggunakan hasil dari pelatihan ketika terjadinya bencana, kami juga memberikan anggaran walaupun terbatas untuk mempermudah mereka.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk kepuasan masyarakat saya melihat ketika di lapangan alhamdulillah dari masyarakatnya terlihat cukup puas aja. Mungkin karena dari kami juga selalu mengikuti SOP dan kebijakan yang

sudah ada jadi kami mengusahakan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.”(Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“masyarakat puas saja ketika melakukan kegiatan mitigasi karena kan banjir ini memang sangat sulit untuk dicegah jadi mereka sudah menganggap ini hal biasa yang terjadi tiap tahunnya, jadi dari mereka juga yang sudah dilatih juga cepat tanggap ketika akan terjadinya banjir maupun ketika sudah terjadinya banjir.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom., selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat ada yang beberapa terlihat senang ketika mengikuti program mitigasi, ketika pembagian sembako masyarakat sudah pasti senang. Dan juga ketika akan dilakukannya destana masyarakat ada yang bisa langsung mengikuti tanpa ditunjuk oleh kami.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat umumnya cukup menerima pelayanan yang diberikan BPBD, terutama saat kegiatan sosialisasi maupun penyaluran bantuan ketika terjadi banjir. Memang ada beberapa masukan dari masyarakat terkait waktu penyaluran bantuan dan jumlah bantuan yang diterima, tetapi sejauh ini keluhan tersebut masih dapat dikomunikasikan dengan baik. Menurut saya BPBD sudah berupaya memberikan pelayanan sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia.” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya, dari kualitas layanan dari dinas badan penanggulangan bencana daerah terkait mitigasi bencana banjir sudah sesuai dengan tupoksi mereka bekerja untuk melayani masyarakat dalam urusan penanggulangan bencana, dan saya selaku masyarakat senang karena dari pihak bpbd selalu mengusahakan apa yang dikeluhkan dari masyarakat.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Jadi saya selaku masyarakat yang biasanya dibantu oleh bpbd ketika banjir, menurut saya, bantuan bpbd terlambat dalam membagikan sembako kepada masyarakat. Saya bersyukur saja karena dapat bantuan, namun yaa itu terlambat banjir lagi tinggi sampai sudah memasuki rumah masyarakat.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“saya tidak tau apakah memang bpbd biasanya membantu ketika banjir sudah hampir mereka alasannya kenapa. Contohnya seperti mendirikan posko ketika ditengah tengah banjir lagi tinggi. Dan cuma beberapa tempat saja yang mendapatkan bantuan seperti membagi sembako” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, indikator kepuasan masyarakat dapat dikategorikan cukup baik, karena mayoritas masyarakat menerima dan merasakan

manfaat layanan BPBD, meskipun masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan mitigasi banjir yang diberikan BPBD cenderung beragam. Sebagian besar informan menyatakan bahwa masyarakat menerima dengan baik kegiatan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, program Desa Tangguh Bencana (Destana), serta bantuan yang diberikan saat terjadi banjir. Masyarakat juga menilai BPBD telah berupaya memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya serta berusaha menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang menyampaikan ketidakpuasan, terutama terkait keterlambatan penyaluran bantuan dan belum meratanya distribusi bantuan kepada seluruh wilayah terdampak banjir. Selain itu, respons masyarakat terhadap sosialisasi mitigasi banjir tidak selalu tinggi karena banjir dianggap sebagai kejadian yang rutin terjadi setiap tahun.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, indikator kepuasan masyarakat dapat dikategorikan cukup baik, karena pelayanan yang diberikan telah diterima masyarakat dengan cukup positif, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara menyeluruh, masyarakat terlihat cukup antusias mengikuti kegiatan pelatihan dan program kesiapsiagaan yang diselenggarakan oleh BPBD. Pada kegiatan sosialisasi, partisipasi masyarakat tetap ada

meskipun tingkat antusiasmenya tidak setinggi kegiatan pelatihan. Dalam pelaksanaan bantuan saat banjir, masyarakat menerima bantuan yang diberikan dan berinteraksi dengan baik dengan petugas BPBD. Namun, di lapangan masih ditemukan beberapa keluhan masyarakat terkait waktu penyaluran bantuan dan cakupan penerima bantuan yang dinilai belum merata. Meskipun demikian, tidak ditemukan konflik atau tindakan anarkis dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan BPBD.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penerimaan dan respons positif masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, program Destana, serta bantuan yang diberikan saat terjadi banjir. Masyarakat juga menilai bahwa BPBD telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga menilai bahwa BPBD telah berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel kualitas layanan karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator kepuasan masyarakat dikategorikan cukup baik.

b) Kecepatan dan kemudahan pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam hal kecepatan dan kemudahan pelayanan kami selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, kami juga diberi waktu untuk melakukan kegiatan mitigasi, jadi kami selalu tepat waktu dan mempermudah pelayanan ke masyarakat terkait bencana banjir.” (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Dari kami yang memang bekerja untuk melayani masyarakat dari bencana, jadi kami harus cepat dalam membantu masyarakat, dan kami selalu memudahkan pelayanan kepada masyarakat.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“jadi ketika turun ke lapangan maupun sebelum turun lapangan, kami selalu mencari strategi terbaik untuk memberikan layanan yang cepat dan dapat mempermudah masyarakat, alhamdulillah dari banyaknya kegiatan mitigasi banjir, kami selalu tepat waktu melaksanakannya, namun ada beberapa kendala yang timbul.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Saya selalu staff sekretariat, jadi dari bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan dan dari tim trc yang turun lapangan saya melihat mereka selalu sigap dan selalu menjalankan kewajiban mereka terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk pelayanan kepada masyarakat, kami berusaha memberikan respon yang cepat terutama saat ada laporan atau informasi terkait banjir. Biasanya kami langsung melakukan koordinasi dan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan sebelum turun ke lapangan. Dalam kegiatan mitigasi juga kami selalu berupaya agar pelaksanaannya tepat waktu supaya masyarakat bisa segera mendapatkan informasi dan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga berusaha memberikan pelayanan yang mudah dipahami masyarakat, baik melalui penyampaian langsung maupun informasi yang diberikan saat kegiatan berlangsung.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Bagus, dari pihak BPBD selalu cepat dalam menanggulangi bencana banjir termasuk wilayah Amuntai tengah sini, mungkin karena kantor baru mereka sudah berada di tengah tengah Amuntai Tengah jadi rasa tidak mungkin mereka lambat dalam membantu masyarakat, kecuali ada kendala. Dan dalam hal kemudahan biasanya kami ikut serta turun ke lapangan bersama, jadi kami melihat bagaimana dari bpbd selalu mengusahakan melayani masyarakat secara teratur dan mempermudah kami juga yang ikut serta.” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, bantuan dari BPBD memang ada, tetapi biasanya datang setelah banjir sudah cukup tinggi. Kadang masyarakat sudah lebih dulu mengatasi keadaan sendiri sebelum bantuan atau petugas datang ke lokasi. Jadi untuk kecepatannya masih perlu ditingkatkan lagi.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Waktu banjir kemarin petugas memang datang dan ada bantuan yang diberikan, tetapi menurut saya cukup terlambat. Saat bantuan datang, air sudah masuk ke rumah warga dan aktivitas masyarakat sudah terganggu. Kalau bisa penanganannya lebih cepat supaya masyarakat tidak terlalu lama menunggu.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, bantuan dari BPBD memang kadang tidak langsung datang saat banjir mulai terjadi, jadi bisa dibilang sedikit terlambat. Namun keterlambatan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena masyarakat di sini sudah terbiasa menghadapi banjir setiap tahun dan biasanya sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang penting bantuan dan pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat yang terdampak.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, indikator kecepatan dan kemudahan pelayanan dapat dikategorikan cukup baik, karena pelayanan yang diberikan relatif mudah diakses dan telah dilaksanakan dengan cukup responsif, meskipun kecepatan penanganan pada beberapa kondisi masih perlu ditingkatkan. diketahui bahwa BPBD berupaya memberikan

pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat dalam kegiatan mitigasi maupun penanganan bencana banjir. Pihak BPBD menyatakan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, didahului dengan koordinasi dan penyusunan strategi agar pelayanan dapat berjalan efektif serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan bantuan. Pihak Kecamatan Amuntai Tengah juga menilai bahwa BPBD cukup cepat dalam merespons kejadian banjir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai kecepatan pelayanan. Beberapa masyarakat menilai bahwa bantuan dan kehadiran petugas BPBD sering kali datang setelah kondisi banjir sudah cukup tinggi dan aktivitas masyarakat telah terganggu. Meskipun demikian, masyarakat tetap mengakui bahwa bantuan dan pelayanan dari BPBD tetap diberikan serta dapat membantu masyarakat terdampak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, indikator kecepatan dan kemudahan pelayanan dapat dikategorikan kurang baik. Peneliti mengamati bahwa dalam beberapa kondisi bencana banjir, respons BPBD dalam turun ke lapangan masih tergolong lambat. Kegiatan penanganan maupun mitigasi sering kali baru dilaksanakan ketika kondisi banjir sudah cukup tinggi dan berdampak pada masyarakat. Bahkan dalam beberapa kejadian, kegiatan di lapangan baru dilakukan ketika kondisi banjir mulai

surut sehingga upaya penanganan dan mitigasi dinilai kurang maksimal dalam mengantisipasi dampak bencana sejak awal. Selain itu, meskipun BPBD tetap melakukan koordinasi, pemantauan lapangan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat, kecepatan pelayanan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta luasnya wilayah yang harus ditangani. Oleh karena itu, indikator kecepatan dan kemudahan pelayanan dinilai kurang baik karena respons pelayanan di lapangan belum dilakukan secara cepat dan optimal dalam menghadapi kondisi banjir yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan kemudahan pelayanan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya upaya BPBD untuk memberikan pelayanan secara cepat melalui koordinasi, pemantauan lapangan, sosialisasi, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga relatif mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan dan saluran informasi yang tersedia.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel kualitas layanan

karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator kecepatan dan kemudahan pelayanan dikategorikan cukup baik.

c) Responsivitas

1. Kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya kami selalu menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat oleh sebab itu kami meminta data kepada tiap desa yang terkena dampak banjir, jadi kami menyiapkan apa yang dibutuhkan desa tersebut seperti sembako.” (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Ketika kami melakukan sosialisasi, kami memberikan nasi kotak sebagai konsumsi untuk masyarakat yang ikut kegiatan, untuk sosialisasi sekolah atau perguruan tinggi biasanya kami bersurat untuk menentukan tanggal kegiatannya, dan juga untuk desa kami tergantung peserta, kalau peserta nya banyak hanya beberapa desa saja melakukan sosialisasi yang dilakukan dalam setahun. Dari desa nya juga bisa menunjuk satu orang untuk kami latih, agar mempunyai kemampuan apabila terjadi bencana di desa mereka sudah siap mengantisipasi. Dan kami selalu meminta atau menunggu data yang akan dikirimkan oleh desa yang terkena banjir, lalu setelah itu kami berikan pelayanan atau kebutuhan yang dibutuhkan desa tersebut.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai kebutuhan masyarakat, biasanya untuk layanan dari bpbd itu sebelum dilakukan harus ada data dari tiap desa ataupun daerah yang terkena banjir baru bisa dilakukan. Alhamdulillah dari masyarakat nya selalu menerima.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk kebutuhan masyarakat kami akan mengusahakan apa yang sangat dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu contohnya seperti sembako” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya dari kami perlu adanya data dari desa baru bisa menyesuaikan kebutuhan dari desa tersebut. Jadi, desa yang kena dampak banjir itu perlu adanya data dulu yang dikirim ke kecamatan, lalu dikirim ke kami data itu.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“BPBD biasanya terlebih dahulu meminta data dari desa dan kecamatan mengenai warga serta wilayah yang terdampak banjir. Dari data tersebut mereka menentukan bantuan apa yang diperlukan masyarakat. Karena itu bantuan yang diberikan umumnya menyesuaikan kebutuhan di lapangan, misalnya sembako

dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi sebelum bantuan disalurkan memang ada proses pendataan terlebih dahulu agar lebih tepat sasaran. Jadi bisa dibilang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Waktu banjir kami menerima sembako dan beberapa kebutuhan pokok lainnya yang memang diperlukan. Petugas juga mendata warga terlebih dahulu sehingga bantuan yang datang cukup membantu warga yang terdampak.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Bantuan yang diberikan memang sangat membantu kami, terutama sembako saat banjir terjadi. Namun kalau banjir berlangsung cukup lama, bantuan yang diberikan biasanya hanya cukup untuk beberapa hari saja. Setelah itu kami harus mencari cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai kondisi kembali normal.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali selaku Masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk bantuan memang ada yang sesuai kebutuhan, tetapi kadang ada juga yang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya saat air masih tinggi dan warga lebih membutuhkan kebutuhan tertentu, bantuan yang datang tidak selalu sama dengan yang paling dibutuhkan saat itu. Namun kami tetap bersyukur karena ada perhatian dari pemerintah.” (Wawancara pada 19 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan

Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, indikator kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat dapat dikategorikan cukup baik, karena layanan yang diberikan telah didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui proses pendataan, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan secara optimal. Diketahui bahwa BPBD berupaya menyesuaikan layanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Sebelum memberikan bantuan maupun pelayanan, BPBD terlebih dahulu melakukan pendataan melalui desa dan kecamatan untuk mengetahui jumlah warga terdampak serta kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Hasil pendataan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan bentuk bantuan yang akan disalurkan, seperti sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan, BPBD juga menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Sebagian besar informan dari pihak pemerintah maupun masyarakat menilai bahwa bantuan dan layanan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa masyarakat menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang lama atau belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat banjir berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, indikator kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat dapat dikategorikan cukup baik, karena pelayanan yang diberikan telah mengacu pada kebutuhan masyarakat, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh. BPBD melaksanakan pelayanan dengan mengacu pada data masyarakat terdampak yang diperoleh dari desa dan kecamatan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat umumnya berupa sembako dan kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan utama saat terjadi banjir. Meskipun pelayanan yang diberikan telah berupaya menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dalam beberapa kondisi masih ditemukan keterbatasan jumlah bantuan yang tersedia sehingga belum seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara maksimal, terutama ketika banjir berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya upaya BPBD untuk melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap masyarakat dan wilayah terdampak sebelum menentukan bentuk pelayanan maupun bantuan yang akan diberikan. Dengan adanya proses pendataan tersebut, bantuan yang disalurkan umumnya telah

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama kebutuhan pokok seperti sembako.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel Responsivitas karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat dikategorikan cukup baik.

2. Kecepatan menanggapi keluhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau ada keluhan dari masyarakat tentu kami terima dan kami tindak lanjuti. Biasanya kami terlebih dahulu meminta informasi yang jelas mengenai permasalahan yang disampaikan, kemudian melakukan pengecekan ke lapangan apabila diperlukan. Namun tidak semua keluhan bisa langsung kami selesaikan saat itu juga karena ada beberapa yang harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait seperti PUPR maupun pemerintah daerah. Selain itu juga harus menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Jadi setiap keluhan tetap kami proses, hanya saja pelaksanaannya mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku.”
(Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Setiap ada masyarakat yang menyampaikan keluhan, kami biasanya langsung menerima informasi tersebut dan melakukan pengecekan awal. Tetapi untuk tindak lanjutnya tidak bisa langsung

dilaksanakan karena harus ada koordinasi dengan pihak terkait dan menunggu arahan dari pimpinan. Kadang kendala utamanya memang dari anggaran, jadi penanganannya tidak bisa langsung dilakukan saat itu juga. Biasanya laporan masyarakat kami kumpulkan terlebih dahulu, kemudian disampaikan kembali dalam rapat atau koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kami tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat, hanya saja prosesnya perlu tahapan dan koordinasi lebih lanjut.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya setiap kami menerima keluhan dari masyarakat, kami tidak bisa langsung mengerjakan ke lapangan karena harus ada lintas sektor, koordinasi dengan bupati, pupr dan skpd yang terkait itu yang perlu meninjau terlebih dahulu karena yang pertama gara gara anggaran. Kami mendengarkan aja apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan kami bisa saja langsung mengeksekusi turun lapangan, tapi apabila terkendala oleh anggaran kami menampung terlebih dahulu keluhan dari masyarakat lalu kami sampaikan ke bupati.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau ada laporan atau keluhan dari masyarakat terkait banjir, biasanya kami menerima dan mencatat dulu laporan tersebut untuk disampaikan ke pimpinan. Namun, kami tidak selalu bisa langsung melakukan penanganan di lapangan karena harus melalui koordinasi dengan instansi terkait, seperti PUPR dan pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan penanganan juga menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Jadi sementara waktu kami menampung dulu keluhan masyarakat, lalu hasil laporan itu diteruskan untuk dibahas lebih lanjut. Walaupun begitu, kami tetap berusaha memberikan respon dan melakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Bagus, karena kami pihak kecamatan selalu mengikuti ketika bpbd melakukan kegiatan mitigasi jadi kami melihat langsung bagaimana mereka ketika membagi sembako ataupun kegiatan lainnya. Kalau masalah kecepatan dari bpbd menunggu dari pihak tertentu untuk melakukan kegiatan mitigasi karena menyesuaikan data yang sudah diberikan.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau ada keluhan dari masyarakat biasanya langsung disampaikan melalui desa atau kecamatan terlebih dahulu, kemudian diteruskan kepada BPBD. Dari yang saya lihat, BPBD cukup cepat merespon laporan yang masuk, terutama untuk melakukan pengecekan dan koordinasi ke lapangan. Namun untuk tindak lanjutnya memang tidak selalu bisa langsung dilaksanakan karena harus menyesuaikan data, koordinasi dengan instansi terkait, dan ketersediaan anggaran. Jadi respon awalnya cukup cepat, tetapi proses penanganannya kadang memerlukan waktu.” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“keluhan dari masyarakat biasanya tetap ditanggapi oleh petugas, apalagi kalau disampaikan melalui aparat desa. Memang tidak langsung dikerjakan saat itu juga, tetapi biasanya ada tindak lanjut atau pengecekan ke lokasi terlebih dahulu” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Jadi saya selaku masyarakat yang biasanya dibantu oleh bpbd ketika banjir, menurut saya, bantuan bpbd terlambat dalam membagikan sembako kepada masyarakat. Saya bersyukur saja karena dapat bantuan, namun yaa itu terlambat banjir lagi tinggi sampai sudah memasuki rumah masyarakat.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“saya tidak tau apakah memang bpbd biasanya membantu ketika banjir sudah hampir mereka alasannya kenapa. Contohnya seperti mendirikan posko ketika ditengah tengah banjir lagi tinggi. Dan cuma beberapa tempat saja uang mendapatkan bantuan seperti membagi sembako” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, Oleh karena itu, indikator kecepatan menanggapi keluhan dapat dikategorikan cukup baik, karena BPBD telah memberikan respon terhadap setiap keluhan yang masuk, tetapi proses tindak lanjut dan penyelesaiannya masih memerlukan waktu akibat berbagai kendala administratif dan keterbatasan sumber daya. diketahui bahwa BPBD selalu menerima dan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan masyarakat terkait bencana banjir. Keluhan yang masuk umumnya terlebih dahulu dicatat, diverifikasi, dan dilakukan pengecekan lapangan apabila diperlukan. BPBD juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, PUPR, dan SKPD lainnya sebelum menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa

respon awal terhadap keluhan masyarakat cukup cepat, terutama dalam menerima laporan dan melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Proses penyelesaian keluhan tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui tahapan koordinasi, penyesuaian data, serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Beberapa masyarakat juga menilai bahwa bantuan yang diberikan masih terlambat dan belum merata di seluruh wilayah terdampak banjir.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa indikator kecepatan menanggapi keluhan berdasarkan hasil observasi dapat dikategorikan kurang baik, karena terdapat upaya untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, proses penyelesaian keluhan masih relatif lambat dan belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat secara cepat dan tepat waktu. Peneliti juga menemukan bahwa meskipun BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terkait bencana banjir, tindak lanjut terhadap keluhan tersebut belum selalu dilakukan secara cepat. Dalam beberapa kondisi, proses penanganan masih memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui tahapan pendataan, verifikasi, serta koordinasi dengan instansi terkait sebelum tindakan dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat keluhan masyarakat yang belum segera mendapatkan penyelesaian sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama untuk memperoleh bantuan atau penanganan yang dibutuhkan. Peneliti juga mengamati

bahwa pelaksanaan bantuan dan penanganan di lapangan sering kali dilakukan setelah kondisi banjir sudah cukup tinggi, sehingga masyarakat terlebih dahulu melakukan upaya penanganan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecepatan dalam menindaklanjuti keluhan dan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan menanggapi keluhan oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori kurang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun BPBD menerima dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat, beberapa informan menyatakan bahwa respon yang diberikan masih tergolong lambat, terutama dalam menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat saat banjir terjadi. Masyarakat mengakui bahwa keluhan yang disampaikan umumnya mendapat tanggapan dari BPBD, namun proses tindak lanjut di lapangan sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa respon BPBD terhadap keluhan masyarakat belum dilakukan secara cepat. Dalam beberapa kejadian banjir, BPBD terlihat terlambat turun ke lapangan untuk melakukan penanganan maupun menindaklanjuti laporan masyarakat. Kegiatan penanganan sering kali baru dilakukan ketika kondisi banjir sudah

cukup tinggi bahkan mendekati surut, sehingga masyarakat menilai bahwa respon terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat terdampak masih kurang cepat.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel responsivitas karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator kecepatan menanggapi keluhan dikategorikan kurang baik.

d) Responsibilitas

a) Kepatuhan terhadap SOP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kami memang harus melakukan nya sesuai SOP yang sudah diberikan dari pa Bupati dan SKPD terkait. Kami tidak berani melakukan kegiatan mitigasi langsung tanpa adanya SOP yang jelas. Dan kami memiliki 10 SPM, dan 9 sudah terealisasi karena berkaitan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.”
(Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk kegiatan mitigasi banjir, kami pasti mengacu pada SOP yang sudah ada. Soalnya SOP itu jadi pedoman kami dalam bekerja di lapangan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan harus sesuai prosedur dan biasanya kami juga berkoordinasi dengan instansi

terkait supaya kegiatan berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kami di lapangan tentu harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya sudah ada arahan dan pembagian tugas yang jelas, jadi kami tinggal menjalankan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan adanya SOP pekerjaan lebih teratur dan memudahkan kami dalam melaksanakan kegiatan mitigasi banjir.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“alhamdulillah kami tiap berkegiatan selalu mengikuti SOP yang ada. Dan perlu berkoordinasi dengan bupati, PUPR dan pihak terkait.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Dari kami biasanya memang selalu mengikuti SOP yang diberikan untuk kelancaran kegiatan kami dalam melakukan mitigasi. Walaupun ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah nya terselesaikan.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Dari yang saya lihat selama berkoordinasi dengan BPBD, setiap kegiatan yang mereka laksanakan sudah memiliki prosedur

dan tahapan yang jelas. Biasanya sebelum kegiatan dilakukan ada koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kecamatan maupun desa. Jadi pelaksanaannya terlihat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sehingga kegiatan dapat berjalan lebih tertib.” Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai SOP saya tidak mengetahui secara rinci. Namun saat ada kegiatan sosialisasi, petugas BPBD pernah menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan ketika menghadapi banjir. Dari yang saya lihat, mereka biasanya bekerja sesuai prosedur yang sudah disampaikan kepada masyarakat saat sosialisasi tersebut.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui tentang SOP yang digunakan BPBD. Untuk aturan atau prosedur yang mereka gunakan saya tidak begitu paham.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau soal SOP BPBD saya tidak tahu karena memang tidak pernah melihat langsung dokumen atau aturannya. Saya hanya pernah mendengar penjelasan dari petugas saat sosialisasi mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat ketika banjir terjadi” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, Berdasarkan temuan tersebut, indikator kepatuhan

terhadap SOP dapat dikategorikan cukup baik, karena pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir telah mengacu pada prosedur yang jelas, dilaksanakan secara terstruktur, dan mendapatkan pengakuan dari pihak internal maupun eksternal terkait kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana banjir telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Seluruh pegawai BPBD menyatakan bahwa SOP menjadi pedoman utama dalam perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan kegiatan mitigasi di lapangan. Selain itu, setiap kegiatan juga didahului dengan koordinasi bersama pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Informan dari pihak kecamatan juga menilai bahwa kegiatan BPBD memiliki tahapan kerja yang jelas dan dilaksanakan secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara rinci mengenai SOP yang digunakan oleh BPBD. Namun, masyarakat mengetahui adanya prosedur penanganan bencana melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan BPBD dan menilai bahwa petugas bekerja sesuai dengan tahapan yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, indikator kepatuhan terhadap SOP dapat dikategorikan kurang baik, karena belum didukung dengan ketersediaan SOP yang jelas dan terdokumentasi secara resmi. Ditemukan bahwa pelaksanaan

kegiatan mitigasi banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara memang dilaksanakan dengan tahapan kerja yang terstruktur seperti adanya koordinasi, pembagian tugas, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun demikian, peneliti tidak menemukan adanya dokumen SOP yang jelas dan dapat ditunjukkan secara langsung sebagai pedoman resmi pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir. Dari hasil observasi dan keterangan beberapa pihak di BPBD diketahui bahwa SOP terkait kegiatan mitigasi banjir masih dalam tahap penyusunan sehingga belum sepenuhnya tersedia secara lengkap dan tertulis sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih lebih banyak mengacu pada arahan pimpinan, pengalaman kerja, serta koordinasi antarbidang dalam menjalankan tugas di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap SOP oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Amuntai Tengah masih belum optimal atau berada pada kategori kurang baik. Meskipun pelaksanaan kegiatan mitigasi telah dilakukan melalui koordinasi dan pembagian tugas yang terstruktur, namun hasil observasi menunjukkan bahwa SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan belum tersedia secara jelas karena masih dalam tahap penyusunan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya memiliki standar operasional tertulis yang baku sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Berdasarkan

hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara memang dilaksanakan dengan tahapan kerja yang terstruktur seperti adanya koordinasi, pembagian tugas, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun demikian, peneliti tidak menemukan adanya dokumen SOP yang jelas dan dapat ditunjukkan secara langsung sebagai pedoman resmi pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir. Dari hasil observasi dan keterangan beberapa pihak di BPBD diketahui bahwa SOP terkait kegiatan mitigasi banjir masih dalam tahap penyusunan sehingga belum sepenuhnya tersedia secara lengkap dan tertulis sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih lebih banyak mengacu pada arahan pimpinan, pengalaman kerja, serta koordinasi antarbidang dalam menjalankan tugas di lapangan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, indikator kepatuhan terhadap SOP dapat dikategorikan kurang baik karena belum didukung dengan ketersediaan SOP yang jelas dan terdokumentasi secara resmi.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel tanggung jawab karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator kepatuhan terhadap SOP dikategorikan kurang baik.

b) Kesesuaian dengan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk kebijakan kami selalu menyesuaikan apa yang sudah tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 pasal 3 ayat 1 serta tupoksi dan SOP yang diberikan oleh pa Bupati dan SKPD terkait. Walaupun ada kendala seperti anggaran, dan koordinasi dengan pihak terkait belum akurat.” (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kami memang kalo bekerja sesuai kebijakan dan aturan, jadi yang kami kerjakan sesuai arahan dari permenpan dan kemendagri, jadi otomatis ketika mereka memberikan kerjaan dan wewenang yang diberikan langsung kami jalankan. Jadi dari dulu sampai sekarang kami bekerja sesuai aturan yang diarahkan dan sesuai diperintahkan, namun ada keterbatasan dari kami seperti anggaran dan sdm masih kurang, tapi kami manfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau kami bekerja tentu mengikuti aturan dan kebijakan yang sudah ada. Setiap kegiatan biasanya sudah ada arahan dari pimpinan, jadi kami tinggal menyesuaikan pelaksanaannya di lapangan. Selama ini kegiatan mitigasi yang dilakukan juga

mengacu pada ketentuan yang berlaku supaya tidak keluar dari tugas dan fungsi yang diberikan.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kami selalu mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya ada arahan terlebih dahulu dari pimpinan mengenai apa yang harus dikerjakan. Jadi dalam pelaksanaannya kami menyesuaikan dengan aturan yang berlaku agar kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan mitigasi banjir kami menyesuaikan dengan program dan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Walaupun di lapangan kadang ada hambatan, pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan yang berlaku.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Dari yang saya ketahui, kegiatan yang dilaksanakan BPBD selalu mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku. Sehingga pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan program dan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk aturan dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya saya tidak pernah mendapat informasi secara rinci dan tidak mengetahui. Tapi saya pernah mendengar ketika sosialisasi mereka menjelaskan bahwa selalu mengikuti kebijakan” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui kebijakan yang dimiliki BPBD. Yang saya tahu hanya ketika ada kegiatan sosialisasi atau bantuan saat banjir. Kalau mengenai aturan atau kebijakan yang mereka gunakan dalam bekerja, saya tidak begitu paham.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Sebagai masyarakat kami hanya melihat kegiatan yang dilakukan di lapangan. Jadi saya tidak bisa menjelaskan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan atau tidak.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, indikator kesesuaian dengan kebijakan berdasarkan hasil wawancara dapat dikategorikan cukup baik, karena pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan

yang menjadi pedoman kerja BPBD. Diketahui bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir telah disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. BPBD melaksanakan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta arahan dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Kegiatan seperti sosialisasi kebencanaan, pengkajian wilayah rawan banjir, pelatihan relawan, pemantauan lapangan, dan penyaluran bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi, dalam indikator kesesuaian dengan kebijakan berdasarkan hasil observasi dapat dikategorikan cukup baik, karena kegiatan mitigasi tetap dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi BPBD meskipun SOP belum tersedia secara lengkap dan jelas. peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengikuti program kerja, arahan pimpinan, serta ketentuan umum yang berlaku dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kegiatan sosialisasi, pemantauan daerah rawan banjir, koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, pelatihan relawan, serta penyaluran bantuan tetap dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi BPBD. Namun demikian, peneliti belum menemukan adanya SOP mitigasi banjir yang jelas

dan terdokumentasi secara lengkap karena berdasarkan keterangan pihak BPBD, SOP masih dalam tahap penyusunan. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan di lapangan tetap berjalan dengan mengacu pada arahan, koordinasi, dan ketentuan umum yang berlaku dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil dokumentasi, indikator kesesuaian dengan kebijakan berdasarkan hasil dokumentasi dapat dikategorikan cukup baik karena telah memiliki dasar kebijakan yang jelas, walaupun SOP sebagai pedoman teknis belum tersedia secara lengkap. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 diketahui bahwa BPBD memiliki tugas untuk menyusun dan menetapkan prosedur penanganan bencana sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan mitigasi. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang jelas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun dalam pelaksanaannya, peneliti belum menemukan bukti dokumen SOP mitigasi banjir yang jelas dan terdokumentasi secara lengkap karena SOP masih dalam tahap penyusunan oleh pihak BPBD. Meskipun demikian, kegiatan mitigasi tetap dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD serta mengacu pada kebijakan daerah yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dengan kebijakan dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu

Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mitigasi telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022, tugas pokok dan fungsi BPBD, serta arahan dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Kegiatan mitigasi seperti sosialisasi kebencanaan, pemantauan daerah rawan banjir, pelatihan relawan, dan penyaluran bantuan tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. Namun dalam pelaksanaannya, peneliti belum menemukan bukti dokumen SOP mitigasi banjir yang jelas dan terdokumentasi secara lengkap karena SOP masih dalam tahap penyusunan oleh pihak BPBD.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel responsibilitas karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator kesesuaian dengan kebijakan dikategorikan cukup baik.

e) Akuntabilitas

1. Keterbukaan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Terkait keterbukaan informasi kami akan mengaturnya dan menginformasi jauh hari sebelum terjadinya bencana banjir, kami akan meninjau dan mengintensifikasi di bulan yang kemungkinan terjadinya banjir, lalu kami akan menghimbau masyarakat melalui

media sosial untuk bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, biasanya kami juga memberikan informasi lewat baliho, leaflet, dan vidiotron. dan kami ketika sosialisasi juga akan memberikan informasi terkait bencana banjir dan memperlihatkan lewat vidiotron yang ada di bundaran kota amuntai.” (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Informasi yang kami berikan selalu terbuka untuk masyarakat, dan kami selalu memprioritaskan di wilayah rawan banjir. Kami memberikan layanan informasi bisa secara langsung ketika sosialisasi atau bisa dari media sosial, baliho, vidiotron, maupun leaflet.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kami memberikan informasi kebanyakannya lewat media sosial, seperti tiktok, instagram, facebook yang sudah kami sediakan untuk semua kalangan masyarakat, kami juga biasanya meletakkan baliho ke desa yang rawan banjir.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Di bidang kami biasanya memberikan informasi lewat media sosial pribadi bpbd, yang pastinya mempermudah masyarakat mendapatkan informasi” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Terkait informasi kepada masyarakat, kami selalu berusaha menyampaikannya secara terbuka. Biasanya informasi disampaikan saat kegiatan sosialisasi, melalui aparat desa, media sosial, maupun media informasi lainnya yang dimiliki BPBD. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui kondisi dan potensi bencana lebih awal sehingga dapat melakukan persiapan apabila terjadi banjir.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“BPBD cukup terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya informasi disampaikan melalui media sosial, grup WhatsApp desa, serta saat kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat. Dari pihak kecamatan juga sering menerima informasi dari BPBD untuk diteruskan kepada desa-desa yang berada di wilayah rawan banjir, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi lebih cepat.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya menemukan himbauan dari bpbd seringkali lewat media sosial seperti tiktok, dan whatsapp. Serta baliho yang terletak di beberapa tempat, dan juga vidiotron yang letaknya di layar lebar bundaran kota amuntai” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya informasi dari BPBD cukup mudah didapatkan. Biasanya sebelum musim hujan atau ketika ada potensi banjir, kami menerima informasi melalui grup WhatsApp desa dan media sosial. Informasi yang disampaikan juga cukup jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi banjir.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

"Saya melihat BPBD cukup terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain melalui media sosial, petugas juga memberikan penjelasan secara langsung ketika kegiatan sosialisasi di desa. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat menjadi lebih mengetahui daerah yang rawan banjir dan dapat lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana." (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, indikator keterbukaan informasi berdasarkan hasil wawancara dapat dikategorikan baik, karena BPBD telah menyediakan berbagai saluran informasi yang dapat diakses masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Diketahui bahwa BPBD telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana banjir. Informasi disampaikan melalui berbagai media, seperti sosialisasi langsung, media sosial (*Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp*), baliho, leaflet, videotron, serta melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Informasi yang diberikan meliputi kegiatan layanan mitigasi, potensi banjir, himbauan kesiapsiagaan, wilayah rawan bencana, dan langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika menghadapi banjir. Sebagian besar informan menyatakan bahwa informasi dari BPBD cukup mudah diakses, jelas, dan

membantu masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir.

Berdasarkan hasil observasi, indikator keterbukaan informasi dapat dikategorikan cukup baik, karena informasi kebencanaan disampaikan secara terbuka melalui berbagai sarana komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Peneliti menemukan bahwa BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara aktif menyampaikan informasi kebencanaan melalui berbagai media yang tersedia. Peneliti mengamati adanya pemanfaatan media sosial resmi BPBD, pemasangan baliho di beberapa wilayah, penyampaian informasi saat kegiatan sosialisasi, serta penggunaan videotron untuk menyampaikan himbauan kebencanaan kepada masyarakat. Selain itu, informasi yang diberikan berkaitan dengan kondisi cuaca, kegiatan layanan mitigasi, potensi banjir, kesiapsiagaan masyarakat, dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Beragam media yang digunakan menunjukkan adanya upaya BPBD untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi kebencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya BPBD dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti

sosialisasi langsung, media sosial, baliho, leaflet, videotron, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Informasi yang diberikan meliputi kegiatan layanan mitigasi, potensi banjir, himbauan kesiapsiagaan, wilayah rawan bencana, serta langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika menghadapi banjir.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong (2017: 206-208) pada sub variabel responsibilitas yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, indikator keterbukaan informasi dapat dikategorikan cukup baik, karena BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berupaya menyampaikan informasi kebencanaan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkait mitigasi bencana banjir dengan lebih mudah dan cepat.

2. Pertanggungjawaban kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban kami ke masyarakat, kami bisa mencari data ke wilayah yang terdampak banjir, lalu kami bisa turun lapangan meninjau daerah tersebut, intinya banyak aja pertanggungjawaban kami ke masyarakat. Soalnya masalah bencana terutama banjir bisa dibilang mengganggu bahkan membahayakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi kami memiliki tanggungjawab besar dikarenakan memang tugas kami

membantu dan melindungi masyarakat” (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban dari kami yaitu menginformasi kepada masyarakat daerah rawan, memberikan solusi informasi daerah memberikan ilmu pengetahuan bencana untuk waspada terhadap bencana yang akan datang, melakukan koordinasi tiap daerah yang terkait wilayah yang akan terdampak, itu tanggungjawab kami. Kami akan mencari informasi yang data yang terdampak ke desa dan kecamatan agar data yang didapat sesuai, dan melakukan crosscheck ke desa nya langsung” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab kami kepada masyarakat itu bagaimana kami bisa memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan saat sebelum maupun saat terjadi banjir. Biasanya kami melakukan pemantauan ke lapangan, menerima laporan dari masyarakat, serta membantu proses pendataan daerah yang terdampak. Jadi masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kondisi yang terjadi.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau dari kami, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kebencanaan. Kami membantu proses administrasi, pendataan, dan kebutuhan

kegiatan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Jadi setiap laporan atau kebutuhan yang masuk tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Bentuk pertanggungjawaban kami yaitu memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik. Selain itu kami juga membantu pengelolaan data yang berkaitan dengan kondisi bencana sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat maupun pihak terkait sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., Selau Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Dari yang saya lihat, BPBD cukup bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ketika ada laporan banjir mereka melakukan koordinasi dengan desa dan kecamatan untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu petugas juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak sehingga penanganan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryannor selaku Masyarakat Desa Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya BPBD cukup bertanggung jawab karena ketika terjadi banjir mereka tetap datang ke lokasi untuk melihat kondisi masyarakat. Selain itu mereka juga memberikan informasi dan bantuan kepada warga yang terdampak sehingga

masyarakat merasa diperhatikan.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musaropah selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, petugas BPBD tetap menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Memang bantuan tidak selalu langsung datang, tetapi mereka tetap melakukan pendataan dan memantau kondisi warga yang terkena banjir. Jadi masyarakat masih mendapatkan perhatian dari pihak BPBD.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ali selaku Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya melihat BPBD tetap mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat karena saat banjir mereka mendirikan posko dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Walaupun mungkin belum semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, setidaknya ada upaya dari mereka untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana.” (Wawancara pada 19 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, staf BPBD, pihak Kecamatan Amuntai Tengah, serta masyarakat, indikator pertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan hasil wawancara dapat dikategorikan cukup baik, karena BPBD tetap menjalankan fungsi pelayanan, pemantauan, pendataan, dan penanganan bencana sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Diketahui bahwa BPBD telah melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan mitigasi dan penanganan

bencana banjir. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan memberikan informasi kebencanaan, melakukan pemantauan dan pendataan wilayah terdampak, menerima laporan masyarakat, melakukan koordinasi dengan desa, kecamatan, dan instansi terkait, serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu, BPBD juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat dan kebutuhan yang diperlukan dapat ditangani secara tepat. Sebagian besar informan menilai bahwa BPBD telah menunjukkan tanggung jawab yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat akibat kendala sumber daya dan anggaran.

Berdasarkan hasil observasi, indikator pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dikategorikan cukup baik, karena BPBD menunjukkan keterlibatan langsung dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat terdampak banjir. peneliti menemukan bahwa BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara aktif melakukan pemantauan kondisi wilayah yang terdampak banjir, berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, melakukan pendataan masyarakat terdampak, serta menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Petugas juga terlihat terlibat langsung dalam kegiatan lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat dan memberikan

pelayanan sesuai kebutuhan yang ada. BPBD juga tetap melakukan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pelayanan dan penanganan tetap dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Amuntai Tengah berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan BPBD, seperti penyampaian informasi kebencanaan, pemantauan dan pendataan wilayah terdampak, koordinasi dengan pihak terkait, peninjauan langsung ke lapangan, serta pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya yang memengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan, BPBD tetap berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dengan demikian, indikator pertanggungjawaban kepada masyarakat dinilai cukup baik karena menunjukkan adanya komitmen dan tindakan nyata BPBD dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Temuan ini sesuai dengan teori dari Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) dalam sub variabel akuntabilitas karena teori ini menjelaskan bahwa proses kinerja terdiri dari 5 (lima) komponen/sub variabel, dan di dalam sub variabel ini indikator pertanggungjawaban kepada masyarakat dikategorikan cukup baik.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah

Faktor faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah antara lain:

1. Faktor Pendukung

- a) Adanya instruksi untuk saling bekerja sama dengan Bupati dan wakil bupati, Kecamatan Amuntai Tengah, Serta SKPD yang terkait mitigasi banjir**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Jadi saya pernah kemarin mengikuti musrenbang bersama pa bupati, Camat Amuntai tengah, PUPR, dan beberapa kepala SKPD, jadi disitu kami membahas permasalahan banjir di amuntai tengah dan banjang, untuk meminimalisir banjir yang akan tiba

nantinya, mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Bapak Sahrujani dan Bapak Hero Setiawan memberikan instruksi penekanan kerja sama lintas instansi maupun kantor desa, untuk melakukan kegiatan mitigasi, maupun membantu masyarakat yang terkena dampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Amuntai Tengah, setelah mendapat data dari desa untuk meninjau kondisi di desa tersebut” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Karena kami selalu ada koordinasi dengan pa Bupati dan SKPD terkait, jadi kami sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staff Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Biasanya ada arahan dari pimpinan untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan SKPD terkait. Kerja sama tersebut diperlukan agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan lebih lancar dan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dapat ditangani bersama-sama.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom selaku staff Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Setiap kegiatan mitigasi banjir biasanya selalu melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, kecamatan, desa, maupun SKPD yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kami mengikuti arahan yang diberikan pimpinan untuk saling bekerja sama dan bertukar informasi sehingga data yang diterima lebih akurat dan kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Banatul Mufidah, S.Kep.Ns.MM., selaku Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Dari kami pihak Kecamatan selalu membantu ketika pembagian sembako, serta kegiatan mitigasi banjir. Jadi Pa camat dan beberapa pegawai mengikuti untuk bagian amuntai tengah yang terkena dampaknya. (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalin kerja sama dengan Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan Amuntai Tengah, serta SKPD terkait dalam pelaksanaan mitigasi banjir. Kerja sama tersebut dilakukan melalui koordinasi, rapat, dan kegiatan lapangan untuk membahas permasalahan banjir, menentukan prioritas penanganan, serta membantu masyarakat yang terdampak banjir.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat adanya koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan SKPD terkait dalam kegiatan mitigasi banjir. Kerja sama tersebut terlihat dari pelaksanaan peninjauan lokasi, pendataan wilayah terdampak, dan kegiatan bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dokumentasi, terdapat foto kegiatan rapat koordinasi, peninjauan lapangan, dan kegiatan mitigasi banjir yang melibatkan BPBD, pemerintah kecamatan, serta SKPD terkait. Dokumentasi tersebut menunjukkan adanya kerja sama antarinstansi dalam upaya mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa adanya instruksi untuk saling bekerja sama dengan Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan Amuntai Tengah, serta SKPD terkait telah mendukung pelaksanaan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui koordinasi, rapat, peninjauan lapangan, pendataan wilayah terdampak, dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Sinergi antarinstansi ini membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir serta mendukung upaya pengurangan risiko bencana di masyarakat.

b) Kerja sama tim yang kuat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Saya sangat mengapresiasi kepada para pegawai yang turun lapangan atau sebelum turun lapangan ketika mengatur strategi. Mereka selalu bersemangat ketika berkegiatan di lapangan, makanya kami tepat waktu menyelesaikan kegiatannya.”
(Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., Kabid staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Kami ini di bidang ini cuma bertiga, tapi karena sudah adanya kemistri yang kuat antara kami dan tim trc yang biasanya membantu turun lapangan yang hasilnya mempermudah kami dalam melayani masyarakat dan juga yang pasti menyesuaikan SOP yang ada” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staff Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Walaupun jumlah personel di bidang kami tidak banyak, kami selalu berusaha bekerja sama dan saling membantu dalam setiap kegiatan mitigasi banjir. Sebelum turun ke lapangan kami melakukan pembagian tugas dan koordinasi terlebih dahulu sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih terarah. Semangat kerja dari seluruh anggota tim juga cukup tinggi, sehingga kegiatan di lapangan dapat diselesaikan sesuai target dan tetap mengikuti prosedur serta SOP yang berlaku.” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kerja sama tim yang kuat menjadi salah satu faktor pendukung kinerja BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi banjir. Meskipun jumlah personel terbatas, para pegawai tetap menunjukkan semangat kerja yang tinggi, saling membantu, serta melakukan koordinasi dan pembagian tugas sebelum turun ke lapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat adanya kerja sama yang baik antarpegawai dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi

banjir. Setiap anggota tim menjalankan tugasnya masing-masing dan saling berkoordinasi sehingga kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil dokumentasi, terlihat keterlibatan pegawai BPBD dan tim terkait dalam kegiatan mitigasi banjir di lapangan. Dokumentasi tersebut menunjukkan adanya koordinasi, pembagian tugas, dan kerja sama tim dalam mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kerja sama tim yang kuat menjadi faktor pendukung dalam kinerja BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kegiatan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah. Meskipun jumlah personel terbatas, adanya koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta semangat kerja yang tinggi antaranggota tim mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diselesaikan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

1. Faktor Penghambat

1. Tidak Adanya Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Dirumuskan Secara Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“untuk SOP bisa saja minta data nya ke bidang yang berkaitan seperti bidang pencegahan dan kesiapsiagaan”
(Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM, MM., selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"SOP khusus terkait mitigasi banjir memang masih dalam proses penyusunan. Selama ini kami masih mengacu pada ketentuan yang berlaku, tugas pokok dan fungsi, serta pedoman dari pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan mitigasi. Penyusunan SOP terus kami lakukan agar nantinya menjadi pedoman yang lebih jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan."
(Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staf Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“SOP mitigasi BPBD HSU saat ini masih dalam tahap penyusunan, soalnya kami lagi padat menggawi sub kegiatan yang lain” (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Sejauh yang saya ketahui, SOP mitigasi banjir masih disusun oleh bidang yang menangani. Selama belum selesai, pelaksanaan kegiatan tetap mengikuti arahan pimpinan, tugas pokok dan fungsi, serta ketentuan yang telah ditetapkan." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom., selaku Staf Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"SOP khusus mitigasi memang masih dalam tahap penyelesaian. Namun, kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi tetap dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku dan berdasarkan koordinasi serta arahan dari pimpinan agar pelaksanaannya tetap berjalan dengan baik." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dapat diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai mitigasi bencana banjir di BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara belum tersedia secara final dan masih dalam tahap penyusunan. Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan bahwa informasi mengenai SOP dapat diperoleh melalui bidang yang menangani kegiatan mitigasi, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Sementara itu, Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyampaikan bahwa penyusunan SOP masih belum selesai karena adanya berbagai subkegiatan lain yang menjadi prioritas pelaksanaan.

2. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Dalam mitigasi kami sebenarnya kekurangan SDM, bidang satu hanya 3 orang jadi beban kerjanya jadi besar." (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM., MM., selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Di bidang kami ini cuma mempunyai 3 orang yang membuat pekerjaan kami lebih berat sebenarnya dari menyusun agenda, strategi, dan berkegiatan di lapangan." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staf Sekretariat BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Kalau dilihat dari jumlah pegawai, memang masih terbatas dibandingkan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, terkhusus bidang 2. Saat ada kegiatan besar atau beberapa kegiatan yang waktunya bersamaan, pegawai yang ada harus saling membantu agar pekerjaan tetap selesai." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom., selaku staf Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Menurut saya jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung seluruh kegiatan mitigasi banjir. Karena itu setiap pegawai sering mengerjakan beberapa tugas sekaligus sesuai kebutuhan." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penghambat kinerja BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mitigasi banjir. Jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan beban kerja meningkat karena harus menangani perencanaan, penyusunan program, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan

mitigasi banjir masih belum sebanding dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan. Meskipun demikian, pegawai tetap berupaya mengatasi keterbatasan tersebut melalui kerja sama antarpegawai dan dukungan dari bidang lain serta Tim Reaksi Cepat (TRC).

3. Kurangnya Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syamrani, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Dari segi fasilitas kami ini belum memadai dan alat pekerjaan masih ada yang tidak tersedia." (Wawancara pada 6 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Parnami Azmi, SKM., MM., selaku Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Ditambah beberapa fasilitas kami tidak punya." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saufi selaku staf Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Fasilitas kami di BPBD ini bisa dibilang masih kurang dari peralatan untuk pekerjaan di lapangan." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sapariati selaku staf Sekretariat BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Masih ada beberapa sarana dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Jayanti, S.Kom., selaku staf Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Dari sisi fasilitas juga masih ada beberapa peralatan yang perlu ditambah agar pekerjaan dapat berjalan lebih efektif, terutama ketika kegiatan dilakukan langsung di lapangan." (Wawancara pada 30 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan mitigasi banjir. Kekurangan sarana dan peralatan pendukung menyebabkan beberapa kegiatan di lapangan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan mitigasi, meskipun BPBD tetap berupaya memaksimalkan fasilitas yang tersedia dan memanfaatkan dukungan dari bidang lain maupun Tim Reaksi Cepat (TRC) agar kegiatan tetap berjalan dengan baik.